

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Modul

Asyhadie, Zaeni, dan Ahyar Ariyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN.

Dianta, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembentukan UU SPPA*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. IX. Jakarta: Kencana, 2021.

Muchsin. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

B. Jurnal Ilmiah

Alhakim, Abdurrahman. “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2022): 91–93.

Gunawan, Bagus, dan Tamaulina Br. Sembiring. “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Online Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.” *Indonesian Journal of Law* 1, No. 5 (2024): 107–111.

Lukito, Ratno. “Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2022).

Raharjo, Agus. "Restorasi Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 2 (2020): 135.

Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *De Legalata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* 4, No. 2 (2019): 157. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

Setia Negara, Tunggul Ansari. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4, No. 1 (2023).

Sipahutar, Bernad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rechten* 4, No. 2 (2022): 40–41.

Wardhani, Puspa, Harumsari, dan Ayup Suran Ningsih. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi." *The Prosecutor Law Review* 2, No. 1 (2024).

Wati, Riza, dan Muhammad Siddiq Armia. "Perbandingan Hukum sebagai Sebuah Pendekatan (Comparative Law Approach)." 2026.

Wirantno, Khairul Huda, dkk. "Perlindungan Hukum Awak Kapal atas Pembajakan Kapal Niaga di Laut Indonesia." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, No. 1 (2022): 14–16.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.*